

BAB IV

ALASAN AMERIKA SERIKAT MEMILIH INDIA SEBAGAI MITRA UTAMA TERKAIT KEBANGKITAN CINA DI ASIA.

Beberapa dekade terakhir Cina muncul sebagai *the rising state* dan berusaha memperlebar hegemoninya di dunia khususnya di kawasan Asia. Cina merupakan negara terkuat ketiga setelah AS dan Rusia di bidang pertahanan. Dengan kapabilitas militernya yang besar, kedekatan geografisnya dengan negara aliansi AS, dan keagresifannya di kawasan, kebangkitan Cina menjadi potensi ancaman bagi AS. Oleh karena itu pada bab ini penulis akan memaparkan 4 level ancaman yang dimiliki Cina menurut teori *Balance of Threat* dan upaya balancing yang dilakukan oleh AS dengan memilih India sebagai mitra utama pertahanannya.

A. Analisa 4 Level Ancaman Kebangkitan Cina Menurut Teori *Balance of Threat* Stephen Walt

1. Keunggulan *aggregate power* Cina

Cina adalah negara yang memiliki status *the rising state* yang juga merupakan negara yang memiliki basis militer paling besar di kawasan Asia. Cina menjadi perhatian dunia pada awal tahun 1990-an ketika mereka mulai meningkatkan *aggregate powernya* dengan signifikan. Pada tahun 1950-an dibawah kepemimpinan Mao Zedong, Cina fokus pada pengembangan nuklirnya. Namun pada masa kepemimpinannya, Mao mengalami kegagalan dalam menerapkan praktek *The Great Leap Forward* dan revolusi kebudayaan untuk membangkitkan perekonomian Cina (Dharmawan, 2006). Sehingga, perekonomian Cina mengalami stagnan, tidak efisien,

terjadinya kelaparan dan cenderung terisolasi dari ekonomi global.

Untuk memperbaiki keadaan tersebut, Cina melakukan reformasi ekonomi di bawah kepemimpinan Den Xioping. Dengan menerapkan liberalisasi perdagangan memberikan kemajuan terhadap perekonomian Cina (Agung, 2016). Sejak tahun 1979, Cina muncul sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan perekonomian tercepat dengan rata-rata PDB sebesar 9,5% hingga tahun 2017 (Morrison, 2018).

Tabel 4.1 Anggaran Pertahanan Cina tahun 2011-2016

Year	Defence Budget (in Billion Yuan)
2011	601.1
2012	670.3
2013	720.2
2014	808.2
2015	886.9
2016	954

Sumber: (Global Times, 2016)

Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini melatarbelakangi keinginan Cina untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Hal tersebut adalah upaya Cina untuk memperbesar pengaruhnya di kancah internasional. Sebagai negara dengan yang disegani di kawasan, Cina serius untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Berdasarkan tabel diatas, dari tahun 2011-2016 Cina konsisten meningkatkan anggaran belanja militernya. Dengan besarnya anggaran belanja tersebut menempatkan Cina berada

di nomor dua negara dengan jumlah anggaran pertahanan terbesar setelah Amerika Serikat.

Tabel 4.2 Perbandingan Kekuatan Militer AS, Rusia, Cina dan India Tahun 2018

	U.S	Russia	China	India
Total Population	326,625,791	142,257,519	1,379,302,771	1,281,935,911
Defence Budget (billion)	\$ 647	\$ 47	\$ 151	\$ 47
Active Military Personnel	1,281,900	1,013,628	2,183,000	1,362,500
Total Aircraft	13,362	3,914	3,035	2,185
Tank Strenght	5,884	20,300	7,716	4,426
Total Naval Assets	415	352	714	295
Oil Production (bbl/dy)	8,853,000	10,550,000	3,981,000	734,500

Sumber: (GlobalFirePower.com, 2018)

Melalui program modernisasi militer dan ekonomi Cina menimbulkan peningkatan terhadap anggaran militer dan GDP

Cina, meskipun Cina mengadopsi kebijakan “*Peaceful Rise*”, Cina berusaha untuk menunjukkan bahwa ia memiliki kapabilitas militer yang besar. Paul Kennedy dalam bukunya *The Rise and Fall of the Great Power* mengatakan bahwa kekuatan politik dan militer bertumpu pada kekuatan ekonomi (Kennedy, 1988). Peningkatan kapabilitas militer Cina adalah suatu langkah untuk mendukung kebijakan pertahanan nasionalnya yang terdapat dalam Buku Putih Pertahanan China (*China National Defence*) tahun 2008.

Dengan menaikkan anggaran militer setiap tahunnya Cina kemudian mampu untuk melakukan pengembangan teknologi militer terbarunya seperti pengembangan sejumlah kapal perang, pesawat, dan misil balistik. Pada masa Hu Jintao modernisasi militer Cina lebih terfokus pada sektor laut karena kekuatan laut penting untuk menjaga wilayahnya dari ancaman yang akan datang (Asia Times, 2007). Cina memiliki kekuatan militer perairan yang cukup besar di kawasan Asia dengan memiliki sekitar 50 kapal perang, 50 kapal amfibi, 1 kapal induk dan sekitar 85 kapal peluncur yang disertai dengan misil (Richardson, 2012). Selain melakukan modernisasi pada angkatan lautnya, Cina mengembangkan militernya dengan membangun sejumlah pangkalan udara di berbagai lokasi yang memiliki nilai strategis ekonomi dan militer guna menopang kekuatan lautnya. Salah satu tindakan yang paling jelas adalah dengan dibangunnya pangkalan militer Sansha Garrison di wilayah baru Sansha City (Mastro, 2012).

Ini semua tidak terlepas dari pengembangan teknologi canggih dan industri-industri Cina. Cina sangat memperhatikan inovasi teknologi militernya, meskipun pada awalnya hanya melakukan inovasi terhadap teknologi-teknologi bekas pasokan Uni Soviet dan beberapa yang pernah dibeli dari Rusia, tapi kemudian Cina berhasil melakukan pengembangan sendiri dan menciptakan beberapa teknologi persenjataan baru yang lebih canggih. Cina membangun kompleks industri militer sendiri dengan melibatkan pihak swasta dalam bidang pendanaan dan pengembangan riset-teknologi (Wati, 2013). Cina berusaha

mendorong investasi swasta dan menarik kontraktor-kontraktor terkemuka di bidang pertahanan yang tidak hanya berasal dari dalam negeri tapi juga luar negeri.

Peningkatan anggaran pertahanan Cina yang semakin meningkat dan modernisasi peralatan yang dimiliki menimbulkan kecemasan kepada negara-negara yang ada dikawasan bahkan AS. AS sebagai negara hegemon di Asia menganggap fenomena kebangkitan Cina tersebut adalah sebuah ancaman bagi stabilitas keamanan di Asia. Hal tersebut juga akan mengancam negara-negara aliansi AS di Asia seperti India salah satunya. India adalah mitra utama AS yang sangat strategis dalam upaya membendung dan mengimbangi kebangkitan Cina. Maka dari itu, sebagai negara hegemon AS merasa perlu untuk merancang kebijakan-kebijakan yang strategis dan menguntungkan dalam menanggapi ancaman yang ditimbulkan oleh *total resources* yang dimiliki oleh Cina.

2. Pengaruh *proximate power* Cina

Fakta bahwa Cina memiliki basis militer yang besar di kawasan Asia, mengundang perhatian AS yang menganggap bahwa hal tersebut adalah sebuah ancaman terhadap kepentingannya serta akan mengancam aliansi militernya dengan negara-negara yang berdekatan dengan Cina. Di kawasan Asia, AS memiliki sekutu strategis dalam mempertahankan posisinya sebagai negara hegemon, sekutu itu diwujudkan dalam kerjasama pertahanan yang terjalin dengan India, Jepang, Korea selatan, Filipina, Thailand dan Taiwan. Aliansi yang tercipta dengan negara-negara tersebut berguna untuk mengepung Cina yang berusaha memperluas pengaruhnya. Bahkan negara sekutu AS tersebut sengaja digunakan dalam mengimbangi kebangkitan Cina yang semakin besar.

Menurut Walt, negara akan memperhitungkan ancaman terhadap negara lain dilihat dari sebuah kedekatan geografi. Semakin dekat letak geografisnya, maka ancaman yang akan

datang akan semakin kuat (Walt S. M., 1985). Dalam hal ini, keberadaan Cina di tengah-tengah negara sekutu AS di Asia Pasifik termasuk India, Jepang, Korea selatan dan Filipina maupun sebaliknya akan berpotensi menimbulkan ancaman. Aliansi militer AS-India diwujudkan melalui kerjasama nuklir pada tahun 2008 yang kemudian berkembang hingga penunjukkan India sebagai mitra pertahanan utama AS dalam perjanjian LEMOA. Dalam hubungan sejarah antara India dengan Cina tidak terlalu baik, adanya klaim Cina di sejumlah perbatasan, seperti dalam perbatasan Kashmir, Anurachal Pradesh, serta kepemilikan senjata nuklir. Hubungan antara India dan Cina sangat kompleks dengan persaingan, ketidakpercayaan, dan perselisihan geografis (Mohan, 2012). Sebagaimana diketahui penunjukkan India sebagai mitra utama juga berguna sebagai suatu gertakan dan *balancing* terhadap Cina, dimana India dan Cina memiliki kedekatan geografis.

Sedangkan aliansi antara AS dan Jepang sudah terjalin sejak terbentuk konstitusi tahun 1947 dan perjanjian San Fransisco di tahun 1951. Pada saat yang bersamaan Jepang juga menandatangani perjanjian militer dengan AS (*Japan U.S. Security Treaty*) yang mengizinkan AS untuk menempatkan kekuatan militernya di Jepang. Kerjasama ini terus mengalami perkembangan guna merespon kekuatan 2 negara komunis Asia yaitu Cina dan Korea Utara. Dalam menjaga perairan Jepang, AS membangun pangkalan militer dan melaksanakan patroli laut. Anggaran militer yang besar juga didukung oleh AS (Steinhauer & Fackler, 2013).

Korea Selatan juga merupakan salah satu negara aliansi militer AS yang penting di Asia. Selain untuk mengepung Cina, kerjasama yang terjalin antara AS dan Korsel digunakan AS untuk meredam agresifitas Korea Utara. Kerjasama pertahanan AS-Korsel telah terjalin sejak tahun 1953 dimana AS merupakan produsen tetap senjata dan pesawat militer bagi Korsel. Kedua negara juga secara rutin menggelar latihan militer gabungan baik darat maupun laut (Manyin, 2011).

Selain menjalin aliansi dengan negara-negara maju di Asia, AS juga menjalin aliansi militer dengan beberapa negara berkembang di Asia yaitu Thailand, Filipina, dan Taiwan. Kerjasama pertahanan ini terjalin melalui *Southeast Asia Treaty* pada tanggal 8 September 1954 dan secara khusus *Philippine Treaty* pada tanggal 30 Agustus 1951. Jalinan aliansi tersebut memperbolehkan AS untuk melakukan ekspansi militer dengan membangun pangkalan militernya di masing-masing negara. AS juga berhak untuk menggelar latihan pasukan gabungan dan menjadi produsen tetap transfer senjata antar negara (Asia Pacific Defence Forum, 2014).

Namun walaupun AS sudah menjalin kerjasama dengan banyak aliansi militer di sekitar Cina, tetap saja AS merasa terancam oleh kebangkitan Cina. Hal ini dikarenakan basis militer Cina yang begitu besar jauh mengungguli India dan Jepang sebagai aliansi militer terkuat AS di Asia. Kapasitas angkatan bersenjata (darat, laut, dan udara), kapabilitas senjata-senjata berteknologi tinggi, dan kepemilikan energi nuklir menjadikan status militer Cina sebagai negara yang sulit untuk ditandingi di Asia. Fakta tersebut diperjelas dengan Cina menjalin hubungan kerjasama bilateral yang harmonis dengan Rusia dan Korea Utara sebagai negara penganut komunis-sosialis. Kedekatan secara geografis antara Cina, Korut, dan Rusia semakin meningkatkan tensi ancaman bagi hegemoni AS di Asia (Asia Times, 2013).

Rusia mendukung penuh Cina di bidang militer, hal ini diperkuat dengan kerjasama antara kedua negara terkait tranfer persenjataan, dan latihan militer gabungan. Sementara Korut memiliki hubungan ketergantungan terhadap Cina dalam segala bidang. Cina mendukung penuh atas besarnya pasukan militer dan program pengembangan nuklir Korut. Selain itu Cina juga merupakan importir utama Korut melalui perdagangan dan bantuan asing. Kondisi ini menjadi ancaman yang serius dimana Rusia dan Korut merupakan aktor antagonis bagi Amerika Serikat.

3. Besarnya *offensive capability* Cina.

Gambar 4. 1 World Nuclear Forces 2016

WORLD NUCLEAR FORCES, 2016			
Country	Deployed warheads	Other warheads	Total inventory
USA	1 800	5 000	6 800
Russia	1 950	5 050	7 000
UK	120	95	215
France	280	20	300
China	–	270	270
India	–	120–130	120–130
Pakistan	–	130–140	130–140
Israel	–	80	80
North Korea	–	(10–20)	(10–20)
Total	4 150	10 785	14 935

Sumber: Stockholm International Peace Research Institute

Berdasarkan gambar di atas Cina adalah salah satu negara pemilik senjata nuklir terbesar ke-5 didunia dan merupakan negara yang menyetujui perjanjian [Nuclear Non-Proliferation Treaty \(NPT\)](#). Saat ini Cina memiliki sekitar 45 reaktor nuklir yang beroperasi, sekitar 15 sedang dibangun (World Nuclear Association, 2019). Status Cina sebagai salah satu negara pemilik nuklir menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas internasional karena kebijakan pengembangan nuklirnya yang tertutup bagi masyarakat internasional. Tidak adanya transparansi dalam program pengembangan nuklir Cina yang semakin berkembang membuat gerah negara-negara tetangga di Asia dan Amerika Serikat sebagai negara hegemon (World Nuclear Association, 2019).

Program nuklir Cina semakin dianggap berbahaya karena Cina terbukti melakukan transfer teknologi nuklir ke beberapa negara yang tidak menyetujui *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) di dunia. Ekspor rudal nuklir Cina telah menjadi perhatian masyarakat internasional sejak tahun 1980-an. Cina telah memasok rudal jarak menengah 36 DF-3 ke Arab Saudi pada tahun 1988, dan menyediakan suplai rudal jarak pendek 34 DF-11 ke Pakistan pada tahun 1992 (Shirley, 2011). Cina juga mentransfer ilmu dan teknologi pada beberapa program nuklir negara-negara yang diduga mengembangkan program WMD (*Weapon Mass Destruction*) termasuk Iran, Irak, Libya, Korea Utara, dan Syria (Nuclear Threat Initiative, 2019).

Cina memiliki hubungan yang dekat dengan rivalitas India yaitu Pakistan terkait kerjasama nuklir. Cina memasok bahan-bahan untuk pembuatan nuklir ke Pakistan, serta Cina membantu dalam percobaan-percobaan nuklir yang dilakukan oleh Pakistan. Dalam hal ini menurut Walt, negara yang memiliki kemampuan untuk menyerang (*offensive capability*) akan menimbulkan ancaman bagi negara lain, sehingga membuat negara lain merasa perlu untuk membentuk sebuah aliansi. Dengan program senjata nuklir Cina yang dianggap tidak kooperatif terhadap rezim non-proliferasi, Amerika Serikat merasa perlu untuk mengecam Cina agar menekan perkembangan program nuklirnya. Kerjasama nuklir yang terjadi antara Cina dan Pakistan adalah suatu bentuk ancaman bagi India sebagai rivalitas Cina-Pakistan di kawasan. Jika hal tersebut terjadi, AS meyakini bahwa proliferasi nuklir akan semakin meluas dan tentunya dapat menimbulkan kekacauan pada sistem internasional. Kerjasama nuklir antara AS dan India adalah suatu kebijakan strategis AS dalam mengimbangi program nuklir Cina yang dianggap akan menimbulkan ancaman bahaya bagi negara-negara di kawasan Asia maupun dunia.

4. Agresivitas militer Cina (*offensive intentions*)

Kebijakan-kebijakan Cina yang bertajuk “*Peaceful Rise*” dan Misi Perdamaian, membuat Cina dikenal sebagai negara yang cinta damai. Namun berbanding terbalik dengan tindakan-tindakan agresif yang diambil Cina di kawasan seperti salah satunya pada kasus sengketa Laut Cina Selatan. Hal tersebut menimbulkan insekuritas dan ketidakstabilan dalam kawasan Asia terutama negara-negara yang berdekatan dengan Cina secara geografis. Tindakan agresif oleh Cina ini menimbulkan ancaman bagi AS yang merupakan negara hegemon dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan khususnya sekutu-sekutu AS.

Cina mencoba melebarkan pengaruhnya di kawasan Laut Cina Selatan dengan melakukan klaim atas kepulauan Spratly. Di tambah lagi dengan Cina mengklaim bahwa Laut Cina Selatan adalah “*core interest*” negara mereka (Yoshihara & Holmes, 2011). Negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini menganggap klaim tersebut adalah keinginan Cina untuk menguasai secara penuh wilayah Laut Cina selatan. Bahkan Filipina yang ingin menambang minyak hanya 50 mil dari perbatasannya dilarang oleh Cina (GlobalSecurity.org, 2017).

Hal yang membuat wilayah ini diperebutkan adalah penemuan cadangan minyak bumi yang besar pada tahun 1968. Menurut Badan Informasi energi AS, cadangan minyak di kepulauan Spratly dan Paracel diperkirakan mencapai 11 milyar barrel dan serta gas alam hingga 190 triliun kaki kubik (Kompas.com, 2016). Selain karena terdapat sumber minyak dan gas yang berlimpah, wilayah tersebut dinamakan *maritime superhighway* oleh Cina karena wilayah ini merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk didunia yang bernilai 5,3 triliun dolar AS setiap tahunnya (Kompas.com, 2016).

Aktifitas yang dilakukan Cina di wilayah Laut Cina Selatan adalah mengubah terumbu karang menjadi pangkalan militer dan melakukan patroli Angkatan Udara dan Laut. Cina juga

telah menggunakan lapangan terbang yang ada di Pulau Woody dalam rantai Paracel, dan Cina telah menggunakan rudal darat-ke-udara HQ-9 bergerak selama lebih dari setahun dan menggunakan rudal jelajah kapal. Lapangan udara dan pengawasan canggih serta radar peringatan dini akan memungkinkan militer Cina untuk beroperasi di hampir seluruh Laut Cina Selatan.

Selain di Laut Cina selatan, Cina memperlihatkan agresifitasannya di wilayah Samudra Hindia. Cina sebagai negara yang sedang bersinar telah mampu menunjukkan kekuatan militernya di Samudra Hindia. Salah satunya yaitu Cina membuat kebijakan *string of pearl*, ditunjukkan melalui Angkatan Lautnya yang disebut PLA (People Liberation Army) mengadakan ekspansi ke Samudra Hindia, dan pantai Afrika untuk menyokong pencarian akses litoral bagi Cina dalam rantai pulau pertama, kedua, dan seterusnya yang bertujuan untuk memanfaatkan hubungan serta pengaruh geopolitik, ekonomi, dan militer (Prabhakar, 2009).

Selain itu, Cina mampu menunjukkan pada India bahwa dia mampu bekerjasama dengan negara-negara di sekitar Samudra Hindia, dimana negara-negara tersebut juga berbatasan langsung dengan India. Beberapa tahun terakhir, Cina dengan giat menggalang kekuatan di Samudra Hindia demi melindungi jalur *Sea Line of Communication* (Potgieter, 2012), dimana jalur ini berfungsi untuk menghubungkan jalur minyak yang diambil Cina dari timur tengah melewati selat malaka menuju samudra pasifik. Sehingga jalur SLOC melalui kebijakan *string of pearl* Cina sangatlah penting.

Oleh karena itu, berdasarkan 4 level ancaman Cina yang telah dipaparkan diatas, maka AS sebagai negara hegemon merasa perlu melakukan *balancing* dengan negara aliansinya yang berdekatan dengan Cina khususnya India yang berpotensi lebih dari negara lain dengan tujuan untuk mengimbangi kebangkitan Cina di Asia. Hal ini lebih diperjelas dengan penunjukan India sebagai mitra utama pertahanan AS.

B. Keputusan Amerika Serikat Dalam Memilih India Sebagai Mitra Utama

Sesuai dengan perubahan arah kebijakan AS melalui kebijakan *US pivot to Asia (Rebalancing to Asia)*. AS mengubah poros kebijakannya yang awalnya berfokus pada kawasan Timur Tengah berubah ke kawasan Asia Pasifik. Kawasan ini merupakan sebuah kawasan yang memiliki pengaruh yang cukup kuat di dunia internasional. Dengan kemajuan yang pesat di sektor ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan juga pertahanan, terutama di India, Korea Selatan, Jepang, Cina, dan Taiwan, maka kawasan Asia Pasifik saat ini menjadi perhatian dunia. Oleh karena itu AS perlu untuk menjalin suatu aliansi dengan negara kuat di Asia Pasifik agar tidak terciptanya kekuatan tunggal dalam hal ini Cina yang akan menimbulkan ancaman.

Namun berbagai kebijakan kerjasama yang di ambil oleh AS di kawasan Asia Pasifik seperti pada kerjasama AS dengan Jepang, Korsel dan Filipina dianggap belum mampu untuk mengontrol atau mengimbangi kebangkitan Cina. Kapabilitas militer Cina yang besar dan ditunjang dengan pertumbuhan ekonomi Cina yang berkembang pesat, AS perlu untuk melakukan kerjasama dengan negara yang di anggap sepadan untuk melawan kebangkitan Cina tersebut. India adalah negara yang hingga sekarang dapat menunjukkan eksistensi kekuatan militer dan pertumbuhan ekonominya secara konsisten. Akibatnya munculah rivalitas memperebutkan pengaruh dikawasan antara India dan Cina yang memiliki status *the rising state*.

Rivalitas pengaruh AS dan Cina tentunya dapat dilihat dari terjalinnya hubungan AS dengan negara di sekeliling Cina khususnya India. Secara historis India dan Cina berada dalam kondisi rivalitas dilema keamanan. Dilema karena keduanya

termasuk dalam raksasa ekonomi dunia. Cina saat ini adalah kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia yang berambisi mengalahkan Amerika Serikat dan pengaruhnya di Asia. Salah satu caranya adalah dengan memperlambat pertumbuhan India dan mendukung Pakistan dalam bidang nuklir.

The Times of India melaporkan pada 18 Agustus 2014 Tentara Cina telah memasuki wilayah Ladakh India, menyeberang Garis Kontrol Aktual sejauh 25 hingga 30 km dengan membawa bendera provokasi yang menyatakan bahwa daerah tersebut adalah milik Cina (The Times of India, 2014). Selain konflik perbatasan, India dan Cina juga terlibat dalam perebutan hegemoni di kawasan Asia Selatan. India merasakan ancaman dari Cina berasal dari berbagai sudut, terutama karena kebijakan '*Hexiao Gongda*' yang diterapkan Beijing di Asia Selatan, yaitu 'bersatu dengan yang kecil' (Pakistan, Bangladesh, Nepal, Maladewa, Sri Lanka) 'untuk melawan yang besar' (India) (Mohan, 2012). Cina melakukan pembangunan di wilayah Aksai Chin, disaat India mewaspadai pergerakan Pakistan. Untuk mengukuhkan hegemoninya di Asia Selatan, Cina juga melakukan investasi di bidang pembangunan bagi negara-negara di Asia Selatan.

Di kawasan Asia sendiri, Amerika Serikat tidak jarang turut berkontribusi dalam menyelesaikan konflik-konflik dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada beberapa negara. Di India sendiri, Amerika Serikat telah memberikan banyak bantuan dana dan menjadikan India sebagai salah satu negara *top recipient* bantuan ekonomi Amerika Serikat. Hal ini dibuktikan dengan dana bantuan yang diberikan Amerika Serikat kepada India dari tahun 1946-2012 yang mencapai 65,1 milyar Dollar AS (Rajghattal, 2015).

Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga tercatat telah memberikan bantuan dana kepada India sebesar 100 juta Dollar AS untuk memulai perdagangan pada tahun 1990an. Selain itu, Amerika Serikat juga berperan dalam usaha penyelesaian konflik Khasmir antara India dan Pakistan. Hal ini

menunjukkan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Selatan yang tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga militer dan keamanan. Dalam situs halaman website resmi Amerika Serikat, disebutkan bahwa;

“United State’s interest is to reducing tensions between India and Pakistan, both armed with nuclear weapons, is critical to regional and world security. We will press India and Pakistan toward dialog on all issues, including Kashmir. We will continue to work with Pakistan to promote reforms that will create a more stable, democratic, and prosperous nation. With India, a sister democracy, we will continue to work together on shared strategic interests.” (US Department of State, 2017).

Dari pernyataan AS yang telah disebutkan di atas, AS menunjukkan kepentingannya di Asia Selatan yang ingin mengontrol 13 pengembangan nuklir dan menyelesaikan berbagai konflik yang ada, baik melalui usaha mediasi maupun pemberian bantuan kemanusiaan guna menjaga stabilitas keamanan internasional (US Department of State, 2017)

Gambar 4. 2. 5 Kekuatan Militer Terbesar Tahun 2016



Sumber: Global Fire Power

Pasca perang dingin, kekuatan militer India menjelma menjadi kekuatan militer yang relatif kuat dan besar, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah anggotanya yang mencapai hampir 1,5 juta personil dan dilengkapi dengan peralatan modern dengan industri pendukung, serta anggaran militer yang sangat besar menjadikan India sebagai negara dengan anggaran militer terbesar nomor 2 setelah Cina di Asia, menurut data GlobalFirePower.com militer India menjadi negara terkuat nomor 4 di dunia setelah AS, Rusia, dan Cina secara berurut (GlobalFirePower.com, 2016).

Oleh karena itu AS berusaha untuk terus mempertahankan dan mengembangkan hubungan dengan India ke arah yang lebih baik dan hubungan itu terjalin dalam segala bidang. Dalam bidang ekonomi, Amerika Serikat telah menjadi negara investor terbesar bagi India sekaligus menjadi mitra dagang terbesar India. Pertumbuhan ekonomi India yang terus meningkat 7% tiap tahunnya dengan GDP US\$ 3,61 trilyun menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian kebijakan oleh Amerika Serikat terhadap India di Asia (Ayres & Cholan, 2009).

Kepemilikan nuklir India yang kontroversial membuat dunia gempar karena AS menjalin kerjasama nuklir dengan India yang tidak menyetujui NPT, bahkan AS pada awalnya memberikan sanksi atas percobaan nuklir India tahun 1998 dan mencabutnya tahun 2001. Aliansi AS-India mencapai puncak kerjasamanya dengan AS dalam program nuklir yang lebih di kenal dengan *U.S-India Nuclear deal*. Hubungan AS-India terus mengalami perkembangan hingga pada agustus 2016, AS dan India telah sepakat dalam penandatanganan perjanjian kerjasama dibidang pertahanan logistik, yaitu *Logistic Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA)* dan AS mendeklarasikan India sebagai *Major Defence Partner (MDP)* bagi AS (Cholan, 2017). Kemudian status ini diremikan dalam Undang Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS (NDAA) tahun 2017.

Tabel 4 3 Pilihan rasional AS dalam memilih India

	Pilihan Rational AS
Tujuan	Mengimbangi kebangkitan Cina
Opsi	Kerjasama dengan negara-negara di Asia Pasifik (Jepang, Korsel, Filipina dll.)
Pertimbangan	Kapabilitas militer India yang besar, kedekatan geografis India-Cina dan kepemilikan nuklir

AS berusaha untuk mencari bantuan India dalam pengendalian terhadap kebangkitan Cina. Hal ini akan sangat membantu AS untuk menahan dominasi kekuasaan Cina. Dalam konteks tersebut, AS bermaksud untuk memperkuat

India sebagai bentuk *balancing* terhadap kebangkitan Cina di Asia. Penting untuk dicatat bahwa AS telah menjadi pemasok senjata terbesar di India dan pendukung yang paling dihargai atas upayanya untuk menjadi anggota di Grup Pemasok Nuklir (NSG). Oleh karena itu kerjasama nuklir AS dan India juga akan menjadi suatu tindakan gertakan bagi Cina.

Tentunya dalam memilih India sebagai mitra utama akan mendatangkan berbagai keuntungan bagi Amerika Serikat. Dari sektor perdagangan saja kerjasama pertahanan dengan India akan meningkat pesat, seperti pada beberapa tahun terakhir ini India telah menghapus hambatan-hambatan perdagangan dan menetapkan target bersama Amerika untuk memperluas perdagangan bilateral lima kali lipat menjadi 500 miliar dolar per tahun (Herman, 2016). Pasukan Amerika dan India kini juga melangsungkan latihan bersama tahunan yang signifikan, yang tidak terbayangkan oleh generasi sebelumnya ketika Amerika menjadi pendukung militer kuat Pakistan – saingan utama India. Berdasarkan perjanjian LEMOA yang mengizinkan untuk mengakses pangkalan militer kedua negara akan mempermudah AS untuk mengawasi dan mengontrol keamanan kawasan atas ancaman yang dimunculkan oleh Cina. Namun kerugian yang akan muncul adalah ketika AS memperkuat hubungannya dengan India hingga bekerjasama dalam sektor nuklir, Amerika akan kehilangan sekutu dekatnya terdahulu yaitu Pakistan. Pakistan adalah rival India sejak dahulu dan pernah beberapa kali mengalami konflik. Kerjasama AS-India ini tentu akan meningkatkan tensi di kawasan serta menjadi alat gertakan bagi rival masing-masing negara.

Munculnya India sebagai negara kuat, stabil, demokratis, dan menjadi berpengaruh bagi kepentingan global memiliki potensi untuk meningkatkan efektifitas keamanan dalam sistem internasional. Perkembangan India yang pesat sebagai *rising superpower state* menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah Amerika Serikat sebagai negara hegemon saat ini. India muncul sebagai kekuatan baru di Asia yang telah mengubah konfigurasi kekuatan-kekuatan militer,

politik, dan ekonomi di Asia. Berdasarkan level ancaman Walt dalam kerangka teori BOT dan di dukung oleh konsep *rational choice* oleh Allison, kapabilitas militer yang besar dan kedekatan yang berbatasan langsung dengan Cina serta yang dimiliki oleh India serta kepemilikan nuklir India menjadi pertimbangan AS memilih India sebagai mitra utama pertahanannya. Fakta inilah yang membuat aliansi AS dengan India lebih diutamakan dibanding dengan negara lainnya seperti Jepang, Korsel dan Filipina.